

## **Gerakan Pembebasan Islam Patani di Thailand Selatan** **Studi terhadap Patani United Liberation Organization (1968-1993)**

**Jamaludin**

Fakultas Adab dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

E-mail: jamaluddin\_uin@radenfatah.ac.id

### **Abstrak**

Gerakan pembebasan Patani United Liberation Organization (PULO), diketahui bahwa lahirnya Patani United Liberation Organization pada 22 Januari 1968 diketuai oleh Tengku Bira Kota Nila, berdirinya PULO karena kebijakan asimilasi yang diterapkan oleh pemerintah Thai di sektor pendidikan melarang penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan perbedaan identitas, pada dasarnya perbedaan agama merupakan salah satu faktor pemicu perlawanan. Upaya yang dilakukan PULO sendiri yaitu melakukan perang gerilya dan separatis dimana PULO ingin memisahkan diri dari pemerintahan Thai yang kebijakannya ingin mengasimilasi Muslim Patani ke dalam Thai Budhha sehingga Muslim Patani hilang akan identitas jati diri Muslim-Melayu baik segi bahasa, budaya, dan agama.

**Kata Kunci:** Gerakan, Pembebasan, Islam, PULO

Asia Tenggara adalah sebuah kawasan di benua Asia bagian Tenggara. Kawasan ini mencakup Indochina dan Semenanjung Malaya serta kepulauan di sekitarnya. Asia Tenggara biasa dipilih dalam dua kelompok, yaitu: Asia Tenggara Daratan (ATD) yang meliputi: Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Dan Asia Tenggara Maritim (ATM) yang meliputi: Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Timor Leste (Yusuf, 2013: 327-328). Secara geografis, Asia Tenggara merupakan tempat yang unik dan menarik bagi perkembangan agama-agama dunia, sehingga hampir seluruh agama terutama agama besar pernah singgah dan mendapat pengaruh di beberapa wilayah ini.

Sementara di beberapa wilayah seperti Singapura, Filipina, Thailand Selatan, Myanmar dan Kamboja, dimana muslim berada pada posisi minoritas, mereka berjuang dengan keragaman bentuk tantangan yang dihadapinya untuk memperoleh identitas. Keadaan tersebut menampakkan variasi wajah dan dinamika Islam yang muncul sebagai akibat dari respons atas kondisi sosial dan politik masing-masing negeri kawasan ini (Hitami, 2006: 53-54). Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa umat Islam mengalami dinamika yang variatif terhadap perubahan yang berlaku sesuai dengan kondisi sosio politik dan budaya yang terjadi dan melanda di wilayah-wilayah ini.

Berdasarkan posisi muslim minoritas di atas, jelas proses *regionalisasi* Asia Tenggara menjadi *nation-state* sejak pertengahan abad ke-20 membuat etnis Melayu di beberapa negara di wilayah ini menjadi minoritas (Kettani, 2005: 6). Kaum Muslim Melayu Pattani menjadi minoritas di tengah-tengah pemeluk Budha di Thailand, kaum

Muslim Melayu Moro menjadi minoritas ditengah-tengah pemeluk Kristen Katolik di Filipina, sementara kaum Melayu Muslim di Singapura menjadi minoritas di tengah-tengah pemeluk agama Konghucu.

Thailand (biasa juga disebut *Muang Thai* *Risabdah*) merupakan salah satu negara Asia Tenggara. Merupakan salah satu negara Asia yang secara resmi tidak pernah dijajah oleh negara lain (Saifullah, 2010: 82). Secara historis, negara ini pernah populer dikenal dengan nama Siam. Di wilayah Thailand bagian Selatan terdapat empat belas provinsi, yaitu chumporn, Surathani, Ranong, Phangga, Songkhla, Pattani, Yala, Narathiwat, dan Satun. Secara geografis Thailand cukup mudah untuk dijangkau para pelancong dari zaman ke zaman untuk mencari penghidupan maupun penyebaran agama.

Islam masuk ke Thailand pada abad ke-10 Masehi melalui para pedagang dari Jazirah Arab. Penduduk setempat dapat menerima ajaran Islam dengan baik tanpa paksaan. Kawasan Thailand yang banyak dihuni umat muslim adalah wilayah bagian selatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kantong-kantong muslim di daerah Thailand Selatan ini di antaranya adalah propinsi Pattani, Yala, Satun, Narathiwat dan Songkhla (Pitsuawan, 1989: 167). Di provinsi-provinsi tersebut, rata-rata dihuni oleh sekitar 70-80 persen muslim.

Selain itu, umat muslim juga tersebar di beberapa wilayah lain, seperti di provinsi Pattalung, Krabi, dan Nakorn Srithamm. Jatuhnya pemerintahan militer pada tahun 1973, dan ditegakkannya demokrasi, yang berlangsung hingga 1976 saat Jenderal Kriangsak Chomanan mengambil alih pemerintahan sipil merupakan era baru dalam dunia politik Thailand (Hasbullah, 2003: 266). Dalam periode yang relativ demokratis ini, suara rakyat dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan era baru dalam dunia politik Thai.

Hal ini tampak jelas dari semua keburukan sosial, ekonomi, politik, yang cenderung ditutup-tutupi di bawah pemerintahan militer yang otoriter, mulai diangkat ke permukaan. Bentuk-bentuk keresahan penduduk, kekerasan politisi, perlawanan psikologis, seringnya pelanggaran hukum dan ketertiban serta pemerintah yang tidak efektif di wilayah ini, tampaknya pada umumnya adalah perwujudan fisik politik Thai (Abdullah, 1988: 298). Dengan segala perasaan tertekan yang ada dikalangan masyarakat Melayu-Muslim.

Muslim Thailand merasa dianiaya dan di bawah tekanan pembauran oleh mayoritas (misalnya, mereka dipaksa mengambil nama-nama Thai). Pemerintah mencoba menghancurkan sekolah-sekolah Muslim dan menggantinya dengan sekolah Thai, selain itu pemerintah mencoba menghancurkan pengaruh bahasa Melayu dikalangan Muslim, tidak peduli terhadap perayaan-perayaan Islam, menganiaya, menahan, dan kadang malah membunuh para pemimpin agama dan politik muslim, sekitar lima ratus muslim dibunuh oleh pemerintah memaksa muslim untuk mengambil

nama Thai yang non-Muslim demi menipiskan identitas Islam mereka (Kettani, 2005: 203-204).

Hal ini tampak jelas dengan keluarnya Undang-Undang pendidikan yang melarang pendirian pondok-pondok pesantren baru, serta larangan pengajaran bahasa Melayu di pondok-pondok, untuk kemudian harus digantikan dengan bahasa Thai. Penghapusan pengajaran bahasa Melayu ini merupakan suatu ancaman langsung terhadap identitas kultural mereka (Hasbullah, 2003: 265). Mereka menganggap Undang-undang pendidikan sebagai “batas kesabaran” mereka mengaggap pemerintah Siam berusaha mematikan bahasa Melayu yang dibencinya dan mengubah bahasa Melayu dengan bahasa Thai.

Pada 1975, masyarakat Islam Patani mengadakan demonstrasi besar-besaran di berbagai kota di Patani, yang menuntut pemberian kesempatan yang lebih luas dan pembangunan yang lebih berimbang bagi Patani. Berbagai kegiatan politik dari beberapa kelompok organisasi di daerah Siam bagian Selatan, ancaman yang paling serius terhadap pemerintah adalah gerakan separatis yang beroperasi di daerah Patani. Sementara mereka semua mengejar tujuan akhir yang sama, yakni pemerintahan sendiri.

Terbentuknya berbagai kelompok militan yang secara terang-terangan bertujuan membebaskan daerah Melayu dari pemerintahan Thai dimana gerakan-gerakan separatis muslim ini memperjuangkan hak Melayu-Muslim dan Dilihat dari segala segi, kelompok gerilyanya yang paling efektif dan paling baik organisasinya adalah kelompok dengan basis yang luas ini, yang dikenal dengan Organisasi *Patani United Liberation Organization* (PULO) atau Pertobuhan Persatuan Pembibasan Patani (PPPP) yang didirikan oleh Tengku Bira Kota Nila dan Kabir Abdul Rahman pada tahun 1968, sebagai organisasi induk yang mengordinasikan banyak kelompok yang memerangi pemerintah Thai. Namun demikian, kemunculan PULO mencerminkan perkembangan lain dalam strategi politik mereka untuk menarik basis yang lebih luas. Akibatnya, jika keberadaan banyak faksi di antara para pemimpin gerakan hanya berarti suatu perjuangan kekuasaan di dalam gerakan.

Organisasi pergerakan PULO memiliki sistem pengorganisasian lebih efektif. Basis pendukungnya lebih luas, tersebar di kota-kota maupun desa-desa. Landasan ideologinya dikenal dengan istilah “UBANG TAPEKEMA” yang merupakan kependekaan dari *Ugama* (baca: Agama), *Bangsa*, *Tanah Air* dan *perikemanusiaan* (Hasbullah, 2003: 268). Dengan landasan ideologi yang demikian ini PULO mampu merangkul semua golongan dan lapisan dalam masyarakat Melayu Muslim di Thailand Selatan. Selain itu, PULO juga mampu membangun jaringan internasional yang luas.

Organisasi ini berada dibawah kepemimpinan kaum intelektual yang mudah lebih terorganisir dan mendapat dukungan finansial dari Syria dan Lybia. Tujuan utama PULO adalah mendirikan suatu negara Islam Patani. Selain itu struktur organisasinya menunjukkan adanya tiga tingkatan pimpinan. Dan yang menarik adalah bahwa tingkat

paling atas, yang menentukan kebijakan, berada di Makkah, Saudi Arabia. Menurut Komite Khusus Parlemen yang menyelidiki masalah separatisme, PULO memiliki organisasi yang baik dan didukung oleh lebih dari 8.000 Muslim Patani. Gerakan melayu Muslim di Thailand Selatan ini dapat di kategorikan sebagai gerakan separatis, dimana sejumlah aktor memperjuangkan hak mereka sebagai bangsa.

Mempelajari dari kasus gerakan Melayu-Muslim di Thailand Selatan, faktor-faktor ras, bahasa, agama, adat istiadat, dan kesadaran akan suatu identitas kolektif yang khas, telah dimobilisasikan untuk memperkuat solidaritas kolektif dalam melawan setiap upaya pengintegrasian dan pengasimilasian yang dilakukan pemerintah Thailand. Gerakan Melayu-Muslim di Thailand Selatan ini dapat dikategorikan sebagai gerakan separatis, dimana sejumlah aktor memperjuangkan hak mereka sebagai bangsa.

### **Kondisi Muslim Patani pada Masa dan Integrasi dengan Thailand**

Masuknya wilayah Patani secara resmi ke dalam teritori politik Kerajaan Siam pada 20 Desember 1902 dan mulai diberlakukannya kebijakan asimilasi Thai di wilayah Patani membuat kecewa masyarakat Melayu-Muslim yang mendiami wilayah itu. Merupakan masalah dimana kekuasaan raja-raja Patani di copot oleh kerajaan Siam. pada masa itu, seluruh wilayah bagian selatan diintegrasikan kedalam sistem administrasi dan politik kerajaan Siam. Semasa pemerintahan Chunlalongkorn, raja Siam mulai memberlakukan kebijakan sistem *Thesaphiban*, yang menghilangkan otonomi dan kedaulatan raja-raja melayu muslim. Dengan ditanda tangannya perjanjian Bangkok pada tahun 1902, yaitu ketika sebagian wilayah Patani yang telah di kuasai kerajaan Siam diserahkan kepada kolonial Inggris.

Wilayah-wilayah yang diserahkan kepada kolonial inggris itu adalah wilayah yang kini menjadi negara-negara bagian Malaysia yang berbatasan dengan Thailand. Yaitu Kelantan, Trengganu, Kedah dan Perlis. Dengan penyerahan wilayah itu kepada kolonial inggris, maka kerajaan Siam selamat dari penjajah dan secara historis kerajaan Siam yang berdasarkan pada kosmologi Budha meminjam istilah Surin Pitsuwan ini tidak pernah dijajah oleh kolonialisme Barat. Namun sebaliknya dalam *collective memory* Muslim Melayu Patani telah diakui oleh inggris sebagai bagian dari jajahan Siam walaupun tanpa mempertimbangkan keinginan penduduk asli Melayu Patani.

Sejak saat itu masyarakat Patani resmi hidup di bawah kekuasaan kerajaan Siam. Dorongan rasa kekhawatiran terhadap pemerintah Thailand mulai memunculkan perasaan rasialis etnis Melayu mengingat kenyataan perbedaan keturunan, adat istiadat, agama, dan bahasa (Hidayat, 2014: 93). Muslim Thailand merasa dianiaya dan dibawah tekanan pembauran oleh mayoritas mereka, dipaksa mengambil nama-nama Thai. Sangat tidak menyenangkan di selatan dengan tidak adanya perhatian pemerintah terhadap perasaan kebangsaan (Melayu) dan keagamaan penduduk (Kettani, 2005: 203).

Patani sebagai sebuah kelompok etnik yang berbahasa Melayu dan beragama Islam dipaksa untuk menjadi bagian integral dari masyarakat Thai yang berbeda secara etnik, bahasa, maupun agama. Penyatuan Patani ke dalam Thai-Buddhis banyak mengandung dampak politik, ekonomi, maupun kultural. Usaha yang dilakukan sebagai protes atas politik penyeragaman bahasa, banyak terjadi pembakaran sekolah pemerintah, pengeboman dan perusakan jabatan. Guru-guru Thai-Buddish juga menjadi sasaran penculikan bahkan pembunuhan. Maka kondisi sosial, politik, religius semakin tidak setabil di antara Melayu Muslim dan Siam. Faktor utama adalah ketidakadilan, diskriminasi, dan Patani diintegrasikan sebagai negara Thai. Sebagaimana dalam buku Saiful Muzani; *Tradisi dan Kebangkitan Islam Asia Tenggara*, yaitu;

*“peristiwa-peristiwa kekerasan di Muangthai Selatan, sebagai mana dilaporkan oleh media massa, terkait dengan kata-kata separatis, Muslim, atau Islam, Pemerasan adalah taktik yang paling umum dengan sasaran pejabat-pejabat pemerintah dan pengusaha-pengusaha Thai keturunan Cina. Taktik ini diikuti dengan sabotase terhadap kekayaan negara, terutama sekolah-sekolah dan pos-pos polisi.” dan suatu insiden kekerasan lebih jauh terjadi ketika segerombolan bandit-bandit dari Selatan, menghancurkan suatu pusat meditasi Budha yang jauh terpencil, membunuh 4 biarawan Budha dan melukai 4 lainnya. Juga dua insiden pengeboman bus di mana penumpang-penumpang Budha dibunuh Bangnara, Patani dahulu dan Sekarang, sementara penumpang-penumpang Muslim dibiarkan bebas. Apa yang umum dari tindakan-tindakan kekerasan ini adalah bahwa kekerasan ditujukan secara khusus pada orang-orang Budha.*

Hal ini didasarkan kekhawatiran bahwa politik pendidikan dan penyeragaman bahasa dan menggeser kekuasaan ulama sebagai pengajar dan pemilik pondok. Para ulama merasa geram ketika terjadi pelarangan pemakaian sorban yang diganti dengan topi. Bahasa Melayu diharamkan diajarkan di sekolah, dan dilarang menggunakannya di tingkat kerajaan secara resmi. Begitu juga aksara Melayu yang dahulu dipakai digantikan begitu saja dengan aksara Siam. Kegiatan keislaman dilarang di tingkat negara (Yusuf, 2013: 351).

Beberapa kebijakan politik Thai yang diskriminatif atas identitas keIslaman dan keMelayuan Patani yang harus diperjuangkan: 1. Orang Islam dilarang berkumpul walaupun untuk shalat Jumaat, 2. Orang Melayu Islam dipaksa meninggalkan adat istiadat Melayu Islam dan harus melaksanakan apa yang diperkenalkan dari Bangkok, 3. Orang Islam dilarang mengadakan perayaan agama kecuali hari raya saja, 4. Sekolah agama dan pondok agar ditutup kecuali yang dibawah pemerintahan Thailand, 5. Buku teks agama Islam yang berbahasa Arab dan Melayu dilarang penggunaannya dan digantikan dengan buku teks yang diterjemahkan ke bahasa Thai, 6. Bahasa pengantar di sekolah agama dan pondok yang berbahasa Arab dan Melayu ditukarkan dengan bahasa Thai, 7. Buku terjemahan bahasa Thai dicetak dengan patung Buddha dan pembelajaran harus ikut dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Thai, 8. Patung Buddha dipasang pada sekolah dasar dan menengah walaupun 70% atau 80% muridnya beragama Islam ini juga diterapkan di sekolah agama dan pondok, 9. Pembangunan

dakwah Islam di wilayah Patani semata-mata inisiatif umat Islam Patani. Pihak pemerintah tidak akan memberikan bantuan, dan 10. Bantuan keuangan bagi pendidikan Islam yang datang dari negara Arab, diselewengkan oleh negara Thailand dan hanya 30% yang sampai ke Melayu Muslim.

Secara umum dapat digambarkan bahwa dengan upaya-upaya pemerintah Thai dalam melaksanakan kebijakan asimilasinya, baik itu berupa diskriminatif akomodasi elite politik terhadap etnis Patani, melalui berbagai strategi pemerintah, memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesejahteraan ekonomi bagi etnis Patani. Hal ini menyebabkan serangkaian pemberontakan atau pergerakan-pergerakan etnis Patani untuk mendapatkan hak-hak yang didasarkan oleh mereka yang telah dirampas oleh pemerintahan Thai. Berbagai pemberontakan pun muncul sebagai upaya untuk menentang kebijakan itu. Pemimpin pemberontakan adalah kaum bangsawan dan ulama Patani yang merasa telah kehilangan kekuasaan dan otoritasnya akibat kebijakan tersebut.

Pada tahun 1903, Abdul Kadir memimpin pemberontakan besar terhadap kerajaan Siam. kemudian pada tahun 1910, seorang ulama bernama To'Tae memimpin pemberontakan dan membakar kantor-kantor pemerintahan yang dibangun oleh kerajaan Siam. seterusnya pada tahun 1911, Haji Bula memimpin pemberontakan lainnya yang dengan sangat susah payah dipadamkan oleh pemerintah Kerajaan Siam. Pemberontakan yang sama yang dipimpin oleh To'Janggut juga terjadi di tahun 1915. Namun, pemberontakan yang terjadi ternyata sama sekali tidak memberikan solusi terbaik. Pemberontakan tersebut dengan mudah dapat dipatahkan oleh pemerintah Siam karena lebih bersifat spontan dan lokal.

Pada tahun 1923 pemerintah Thailand terpaksa meninjau kembali kebijakan yang mereka terapkan terhadap Patani, terutama dalam bidang pendidikan wajib, penetrasi birokrasi, dan campur tangan dalam urusan ekonomi dan sosial di Patani. Raja Thailand berupaya memberikan sejumlah konsesi kepada golongan elite keagamaan dan politik Patani dan memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk mengikuti garis-garis kebijakan baru, di antaranya: (a). Praktek-praktek atau peraturan-peraturan yang bagaimanapun yang tampaknya bertentangan dengan Islam harus dihentikan dengan segera. Setiap garis pedoman yang baru tidak boleh melanggar agama Islam. (b). Tingkat pajak yang dipungut dari orang-orang Melayu-Muslim di Patani tidak boleh lebih tinggi dari pajak yang dipungut di negeri-negeri Malaya (yang berada dibawah kekuasaan Inggris), dan (c). Pejabat-pejabat pemerintah yang akan ditugaskan di Patani harus jujur, sopan, dan tegas. Jangan ditugaskan kesana pejabat yang sedang mendapat hukuman karena telah melakukan kesalahan di daerah-daerah lain.

Mengomentari poin-poin di atas, Pitsuwan menyatakan bahwa untuk pertama kalinya pemerintah Bangkok terpaksa memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada Patani dan daerah-daerah sekitarnya, dalam upaya mengintegrasikan ke dalam sistem administratif Thai. Pada tahun 1931 suatu pemberontakan militer berhasil

menumbangkan pemerintahan yang di pimpin raja. Ketika itu Thailand belum memiliki konstitusi (undang-undang dasar) yang dituntut oleh pihak militer. Perkembangan kehidupan modern mempengaruhi golongan militer untuk menciptakan sebuah negara konstitusional sebagaimana negara-negara kerajaan di Eropa dan Jepang di belahan bumi Asia, mendorong kaum militer untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan, dan dengan peranan yang lebih besar di sektor politik bagi golongan militer.

Dalam sejarah Thailand patut dicatat bahwa pihak militer negeri itu telah memainkan peran penting dalam upaya modernisasi struktur pemerintahan, sehingga raja yang berada di atas takhta terpaksa mengikuti keinginan golongan militer tersebut. Atas prakarsa pihak militerlah negeri itu mengubah diri, dari kerajaan yang memiliki undang-undang dasar. Menurut undang-undang dasar kekuasaan raja dibatasi, dan pimpinan pemerintahan berada di tangan perdana menteri. Pemerintah juga tidak dapat berbuat sewenang-wenang karena ia dikontrol oleh suatu dewan perwakilan rakyat (parlemen). Pembaharuan itu diselesaikan pada tahun 1932 (Mangandaralam, 1994: 9).

### **Sejarah Lahirnya Gerakan Pembebasan *Patani United Liberation Organization***

Sebagaimana dipaparkan diatas, muslim di Patani dianeksasi oleh Thailand pada tahun 1902. Sejak saat itu, Muslim Patani hidup dibawah taklukan dan kekuasaan Thailand. Pada tahun 1932, timbul revolusi di Siam / Thailand di mana sistem monarki absolut Thailand berganti menjadi sistem monarki parlementer yang keanggotaannya didominasi oleh orang-orang dari kalangan militer. Puncaknya pada masa pemerintahan Phibul Songkran ketika dia mengganti nama negara dari Kerajaan Siam menjadi kerajaan Thailand pada tahun 1939.

Seorang informan mengatakan bahwa penggantian nama negara itulah akhirnya dari eksistensi Melayu-Muslim dalam prespektif negara Thailand. Warga negara kerajaan Siam yang semula plural ada etnis Siam, ada Melayu Muslim dan Muslim Siam kini disatukan menjadi etnis Thailand, dan dengan demikian tidak ada lagi etnis Siam maupun etnis Melayu dan seterusnya dalam prespektif negara Thailand (Suaedy, 2012: 59).

Penggantian nama tersebut tidak hanya terhadap nama kerajaan melainkan juga berimplikasi pada penyeragaman etnis dan bahasa, menjadi etnis dan bahasa yang unggul yaitu etnis dan bahasa Thai. Pergantian tersebut menjadi lebih mencemaskan lagi, karena mengancam penghapusan identitas Melayu maupun identitas Islam secara tuntas dengan keluarnya Ratthaniyom No. 3 yang berlakunya pada tanggal 2 Agustus 1939 yang isinya antara lain:

*Karena pemerintah memandang bahwa nama-nama yang digunakan oleh warga Thai di beberapa bagian negara ini tidak sesuai dengan nama ras dan acuan penduduknya, dan bahkan rakyat Thai Utara, Thai Timur Laut, Thai Selatan, Thai Islam, tidak sesuai, karena (Muangthai) adalah satu dan tidak bisa dibagi-bagi. Karena itu, pemerintah memberitahukan bahwa keputusan Negara adalah*

*sebagai berikut: (a). Warga Thai jangan memberi nama bertentangan dengan nama ras yang menjadi acuannya, dan (b). Menggunakan kata "Thai" untuk semua warga Thai tanpa pembagian apa pun seperti yang telah disebutkan di atas.*

Pergantian sistem pemerintahan tersebut lantas diikuti dengan semakin radikalnya kebijakan pemerintah pusat Thailand terhadap wilayah-wilayah di Thailand selatan. Jika di era monarki absolut orang-orang Melayu lokal masih memiliki perwakilan di badan pemerintahan Thailand Selatan, maka di era monarki konstitusional sistem perwakilan daerah tersebut dihapuskan dan diganti menjadi sistem yang lebih sentralistik.

Dengan berkuasanya Pibul Songkram yang kauvinistik tahun 1938, kebijakan asimilasi budaya yang dipaksakannya menimbulkan masalah yang fatal bagi aspirasi Muslim-Melayu. Hukum Islam yang sebelumnya ditoleransi, yang menyangkut masalah perkawinan dan warisan, dicabut. Dibawah administrasi rezim ini, dilakukan usaha terus menerus untuk mengasimilasi penduduk muslim melayu. Dalam serangkaian gerakan yang menimbulkan kemarahan di wilayah ini, bahasa dan kebudayaan melayu sangat didiskriminasi.

Sementara itu, di Thailand sendiri Phibul tidak sekedar menempuh suatu politik diskriminasi keagamaan semata-mata terhadap golongan minoritas Melayu. Kebijakannya memang terdiri seperempat tindakan penindasan yang bertujuan untuk menghapus identitas golongan itu sendiri seperti yang di kemukakan oleh Numnonda:

*Pemerintah bahkan memperhatikan dengan cermat kebiasaan-kebiasaan rakyat dalam hal makan dan tidur dan menetapkan bahwa orang harus makan empat kali sehari, tidur antara enam dan delapan jam, harus gerak badan, mendengarkan siaran radio, membaca atau mendengarkan khotbah mengenai Dharma (ajaran Buddhis)..... masyarakat diperingati bahwa kahidupan nasional Thai harus diselenggarakan pertama-tama demi kepentingan bangsa Thai.*

Kutipan yang tertulis di atas menjelaskan pemerintah sudah bertekad untuk mengusahakan agar semua golongan minoritas menjadi orang Buddhis yang berbicara bahasa Thai. Kebijakan-kebijakan pemerintahan Thailand yang baru tidak hanya sampai di situ. Peraturan-peraturan lokal berbasis Islam juga dihapuskan dan masyarakat Thailand selatan diharuskan memakai aksara serta bahasa Thai - menggantikan bahasa Melayu yang selama ini mereka pakai. Hal tersebut pada gilirannya menimbulkan masalah baru bagi penduduk Thailand selatan yang tidak fasih berbahasa Thailand karena peluang mereka mendapatkan pekerjaan jadi menipis. Dalam suasana semacam ini, golongan Muslim Melayu merasa bahwa mereka dijauhkan dari segala kesempatan untuk menerima pendidikan atau memegang posisi-posisi tinggi dalam birokrasi.

Pada masa pemerintahan Phibul Songkram ini muncul tuntutan otonomi bangsa Melayu Patani yang dipimpin oleh Haji Sulong seorang Ulama kharismatik yang pernah



bermukim di Mekah. Haji Sulong menuntut tujuh persoalan yang harus dipenuhi oleh pemerintah yaitu: (1). Pengangkatan seseorang yang berkuasa penuh untuk memerintah keempat provinsi Patani, Narawait, Yala dan Setul, dan memiliki wewenang khusus untuk memecat, menghentikan atau menggantikan semua pegawai pemerintah orang ini harus putra daerah setempat dan dipilih oleh masyarakat. (2). Delapan puluh persen pegawai pemerintah di keempat provinsi ini harus beragama Islam. (3). Bahasa Melayu dan Siam menjadi bahasa resmi, (4). Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah dasar, (5). Hukum Islam harus diakui dan berlaku di pengadilan yang terpisah dari pengadilan negara dimana seorang *qadhi* duduk sebagai penilai. (6). Semua penerimaan dan pendapatan yang berasal dari wilayah ini harus digunakan untuk kepentingan lokal, dan (7). Perbentukan sebuah liga Muslim yang mempunyai kekuasaan penuh mengarahkan semua urusan kaum Muslim di bawah wewenang kepala pemerintahan yang telah disebut dalam butir 1.

Karena tuntutan tersebut, Melayu Patani semakin ditekan oleh pemerintah Thailand dan bahkan Haji Sulong bersama dua temannya, Wan Usman Ahmad dan Encik Ishak Yusuf, ditangkap dan dibunuh oleh polisi rahasia Thailand pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 1954 (Supriyadi, 2008: 212). Setelah kematian Haji Sulong, tujuan gerakan rakyat Melayu Patani tidak lagi menuntut otonomi, tetapi kemerdekaan penuh bagi bangsa Patani. Kematian Haji Sulong membangkitkan rasa nasionalisme di kalangan Melayu Patani dan menginginkan kemerdekaan dengan negara berdaulat yang dibangun diatas ideologi kebangsaan Melayu yang bercorak Islam. Sedangkan menurut Saiful Muzani ada faktor yang menyebabkan atau munculnya nasionalisme Melayu di Patani:

*Tumbuhnya nasionalisme Melayu di Patani dipengaruhi juga faktor eksternal, yang salah satunya adalah gerakan nasionalisme Melayu yang di kembangkan bangsa Indonesia yang mampu melahirkan sebuah negara nasional yang berdaulat.*

Menurut beberapa sumber yang berhasil dihimpun, pola oposisi yang berorientasi ideologi dan kekerasan, sekarang ini telah menjadi pilihan utama para pejuang kemerdekaan Patani yang didasarkan pada semangat nasionalisme Melayu. Para pemimpin dari berbagai kelompok pembebasan itu terdiri atas generasi muda dengan pendidikan Akademis yang mengesankan. Mereka lebih efektif dalam berorganisasi dan lebih metodis dalam melaksanakan rencananya menuju kemerdekaan.

Kaum Muslim Patani menganggap tindakan ini sebagai ekspansi teritorial untuk mempertahankan agama, kebudayaan, dan teritorinya. Seorang pengamat mengatakan bahwa bangkitnya nasionalisme etnik itu merupakan fungsi dari perubahan karakteristik-karakteristik struktural masyarakat, serta persaingan dalam lingkungan ekonomi dan sosiopolitik dalam suatu bangsa (Kuntowijoyo, 1991: 25). Separatisme di Thailand Selatan, baik melalui cara legal atau illegal, dapat dianggap sebagai upaya pemulihan identitas kultural dan agama Patani yang semakin tercabik-cabik oleh

program asimilasi paksa pemerintah Thailand. Munculnya gerakan separatis komunitas Muslim Patani dilatarbelakangi paling tidak merujuk empat hal yang dikemukakan oleh David Wyatt:

*Pertama*, sejarah dan penaklukan oleh Siam, dimana Patani dulu adalah sebuah kerajaan yang termasyur dan pelabuhannya berkembang sebagai pusat perdagangan (*trading port*) terbesar di Asia Tenggara. Penaklukan Patani oleh kerajaan Siam yang kemudian diikuti dengan penerapan tata pemerintahan baru ini menjadi titik awal munculnya gerakan perlawanan. Masyarakat Patani yang menyimpan kenangan sebagai kerajaan masyhur dan menjadi pusat perdagangan yang paling ramai, menginginkan kondisi seperti dulu dan benturan kepentingan yang saling bertolak belakang inilah yang menyebabkan munculnya gerakan separatis pula.

Penyebab *kedua* adalah, kepentingan ekonomi. Wilayah Selatan cukup kaya karena sebagai sumber penghasil minyak, pengembangan industri perikanan dan pengalengan ikan, dan sumber ekonomi lain. Namun demikian, dalam catatan kemiskinan diketahui bahwa Patani adalah wilayah yang berada dibawah garis kemiskinan. Hal ini dikarenakan sebagian besar akses ekonomi yang ada dinikmati oleh anggota komunitas lain di Patani, seperti orang Thailand yang beragama Budha dan keturunan China, sedangkan posisi ekonomi para penduduk Patani hanyalah sebagai pelengkap (*complementer*) dari pada sebagai stakeholder.

Penduduk Patani kebanyakan adalah nelayan, pedagang kecil, pekerja pada sektor transportasi, dan buruh kasar. Dengan demikian, penduduk Patani merasa tersingkir secara ekonomi. Masyarakat Patani merasa hanya menerima imbas kerusakan ekologi dan kehilangan kesempatan untuk menikmati hasil bumi yang diambil dari wilayahnya. Hal ini telah melahirkan perasaan tersingkir dari akses memperoleh kesejahteraan secara ekonomis, yang akhirnya juga memunculkan perasaan anti pemerintah. Ditambah lagi dengan kesempatan bersaing dalam lapangan kerja yang terbatas, terutama bagi mereka yang belajar di luar negeri, dengan alasan bahwa mereka tidak mengerti bahasa Thai dan sendi-sendi kehidupan masyarakat Thai.

Penyebab *ketiga* adalah, migrasi internal. Adanya program migrasi penduduk dari wilayah Utara telah menciptakan kesenjangan ekonomi antara komunitas Muslim dengan komunitas non Muslim. Para penduduk ini dipindahkan dari wilayah utara ke Selatan. Mereka dipindahkan ke Selatan dengan alasan meratakan densitas penduduk, sekaligus meningkatkan taraf hidup penduduk (*Save Settlement*), dimana setiap keluarga diberi oleh pemerintah sebidang tanah garapan seluas 25 rai dan rumah seluas 5 rai). Tujuan lainnya adalah untuk membuat jumlah penduduk di Selatan menjadi “imbang”, antara penduduk Muslim dan Budha. Penduduk yang dipindahkannya sebagian pegawai pemerintah di wilayah utara dan pusat untuk mengisi jabatan-jabatan di wilayah Selatan. Pola ini juga memicu munculnya perlawanan masyarakat Patani. Program tersebut baru berjalan  $\pm$  40 tahun dan dalam kurun waktu 75 tahun, proyek itu

akan menghasilkan jumlah penduduk yang seimbang di wilayah Selatan antara penduduk Muslim dan penduduk Budha.

Penyebab *keempat* adalah, kegagalan mengakomodasi perbedaan identitas. Pada dasarnya persoalan perbedaan agama secara umum menjadi tidak begitu signifikan untuk menjelaskan munculnya perlawanan Patani. Hal ini dikarenakan gerakan separatis yang dilakukan oleh kalangan Muslim di Thailand, hanya muncul di wilayah Selatan. Namun demikian, bagi wilayah selatan, persoalan perbedaan agama menjadi salah satu faktor pemicu muncul dan menguatnya perlawanan. Hal ini tidak lepas dari penerapan kebijakan negara Thailand yang menyangkut penerapan kebijakan nasionalisme Thailand khususnya pada masa pemerintahan Phibul Songkram, di mana berusaha menerapkan konsep ultra *chauvinistic* yang menempatkan budaya Thai lebih tinggi dibandingkan dengan budaya lain yang memberikan efek jangka panjang bagi kelangsungan masyarakat Thailand yang multikultur, seperti banyak kasus yang menjadi contoh perlakuan diskriminatif yang diterima oleh kalangan Muslim khususnya di Selatan, baik dalam bahasa, pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya (Yuniarto: 2015). Sedangkan Menurut M. Abdul Karim di buku Sejarah dan Pemikiran dan Peradaban Islam ia mengatakan:

*Saat ini masih ada umat Islam yang berharap mendapatkan otonomi sendiri, atau paling tidak menjadi penguasa atas masyarakat mereka sendiri. Mereka itu adalah penduduk minoritas muslim dalam negara-negara nasional, misalnya Kashmir di India, Moro di Filipina, Patani di Thailand, Cesnia, Kazana, Cremia—Federasi Rusia dan negara-negara Islam mayoritas di semenanjung Balkan. Alasannya menuntut kebebasan dan kemerdekaan itu adalah karena status sebagai minoritas seringkali mendapat kesulitan dalam memperoleh kesejahteraan hidup dan kebebasan dalam menjalankan agama mereka. (Thohir, 2013: 360)*

Tulisan diatas menjelaskan kesadaran nasionalisme hampir di semua negeri muslim yang menginginkan suatu negara yang berdaulat. Persoalan masyarakat muslim Patani yang ingin memisahkan diri sangat meresahkan pemerintah Thailand. Gerakan pemberontakan kaum separatis Melayu muslim melahirkan sejumlah organisasi. Kelompok-kelompok yang beragam dari organisasi separatis mengaku beroperasi di provinsi-provinsi Melayu Thailand Selatan.

Kelompok terua adalah Barisan Nasional Pembebasan Patani (BNPP), yang didirikan oleh seorang aristokrat Melayu. Barisan ini adalah kelompok Islam konservatif, dan dipercaya punya hubungan yang dekat dengan partai Islam se-Malaysia (PAS), yang pernah berkuasa dinegara tetangga Kelantan. Namun, BNPP telah menjadi kurang aktif pada akhir dasawarsa 1970-an, Barisan Revolusi Nasional (BRN), yang didirikan oleh seorang guru agama, punya suatu sikap yang didasarkan pada ajaran kiri. Karena diduga beraliansi dengan Partai Komunis Malaysia (CPM).

Walaupun BRN cukup berhasil mengusik stabilitas di Thailand selatan lewat aksi-aksi bersenjata, kelompok tersebut tidak pernah berkembang menjadi ancaman regional yang serius karena minimnya dukungan dari rakyat Thailand selatan sendiri - khususnya dari kalangan Muslim konservatif - yang merasa tidak cocok & tidak tertarik dengan ideologi sayap kiri yang diusung BRN. Buntutnya di tahun 1968, sejumlah orang Thailand selatan yang merasa bahwa aksi-aksi perlawanan bersenjata terhadap pemerintah pusat terlalu minim lalu membentuk kelompok pemberontak baru yang bernama Patani United Liberation Organization (PULO; Organisasi Pembebasan Bersatu Patani) sebagai jalan tengah dari kedua organisasi BNPP dan BRN (Pitsuwan, 1989:178).

Organisasi *Patani United Liberation Organization* (PULO) atau Pertumbuhan Persatuan Pembebasan Patani (PPPP) Organisasi ini dibentuk diluar negeri pada 22 Januari 1968 yang dipimpin oleh Tengku Bira. Salah satu hal yang menyebabkan organisasi ini mendapat dukungan luas dari masyarakat massa dan jaringan dunia luar, karena terdiri dari cendekiawan muda, Pendirian ini lengkap tersusun meliputi, politik, ekonomi, keagamaan, seksi agama dan hal ihwal negeri di bawah pimpinan Setia usaha Agungnya Tengku Bira Kotanila atau Kadir Abdul Rahman, serjana sains politik dari universitas di India. Namun beliau aktif dalam berperan perhubungan dunia internasional; Malaysia, Arabia, Syiria dan libya, untuk membawa aspirasi umat Melayu Patani, serta mendapat simpati, dukungan oleh dunia Intenasional (Saiful Muzani, 1993: 34).

PULO dipandang praktis dalam kebijaksanaan-kebijaksanaannya, dan tujuannya untuk menyatukan semua faksi-faksi politik yang aktif melawan impelrialisme Thailand, nampak ditujukan pada semua masyarakat Melayu. Dan oleh karena strukur organisasinya yang cukup canggih, meliputi politik, ekonomi, militer, dan hubungan internasional menyebabkan gerakan ini efektif dan dapat dukungan luas di seluruh dunia khususnya di Asia Barat, disisi lain gerakan ini diorganisasikan oleh orang-orang yang terdidik dan kaum intelektual, maka pinsip-prinsipnya jelas dan terinci. Di samping itu, PULO dikatakan tidak menggunakan taktik pemeras, penculikan, dan perampokan untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya. Dan Para anggotanya adalah sukarelawan yang setuju dengan ideologi politik dari gerakan ini. Seperti dilukiskan oleh seorang pengamat yang dekat dari gerakan separatis Patani:

*PULO, yang pada umumnya sebagai yang paling aktif diantara ketiga kelompok yang menamakan diri front separatis di Thailand Selatan dipimpin oleh Bira, seorang serjana ilmu politik, yang meninggalkan tempat kelahirannya di provinsi Patani 21 tahun yang lalu untuk belajar di India. Ia kemudian menetap di tempat, Negeri Kelantan, di Malaysia Timur-laut, dan pada tahun 1967(sic) mengumumkan terbentuknya PULO, yang bertujuan memulihkan Patani yang didominasi orang-orang Muslim sebagai negri Islam yang otonom.*

Selain itu, PULO dapat mengorganisasikan demonstrasi politik terbesar di daerah Patani, lebih kurang dari 70.000 orang melayu-Muslim mengikut memprotes terhadap kezhaliman, tindakan sewewenangnyanya oleh pemerintah Thai tentang kasus pembunuhannya:

*“empat remaja dibunuh oleh Polisi Thai. Satu selamat dari lima orang, dan memberi tahu kepada pemimipin-pemimpin Melayu Patani”.*

Kecanggihan politik PULO, sehingga dapat berkoalisi antara para ulama, organisasi pelajar, orang-orang Melayu-Muslim yang berkerja sebagai pejabat pemerintah, dan berbagai kelompok politik di patani Raya. itu merupakan bina basis, pangkalan dan strategi, untuk kemudahan organisasi-organisasi perjuangan pembebasan Patani menuju kemerdekaan yang nyata, yaitu sebagai negara Melayu Islam yang berdaulat. Ideologi perjuangan, dengan doktrin, *UBANGTAPEKMA* (Ugama (agama) Bangsa-Tanah air Pri-kemanusiaan). Dan konsep perjuangan pada umumnya adalah perjuangan suci, organisasi, PULO merasa bertanggung jawab memberikan informasi dan jawaban masalah Patani di samping itu menjaga citra perjuangannya di dalam maupun di luar negeri untuk meyakinkan dunia internasional terhadap hakikat yang sebenarnya terjadi di patani selama dibawa pemerintah Thailand. Namun dengan jalan perjuangan bersenjata. Karena seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya diatas, mereka menganggap orang dengan etnis Thai adalah orang yang zalim terhadap Islam dan harus diperangi karena bertentangan dengan hukum Islam.

Tujuan utama organisasi ini adalah mendirikan suatu negara Islam Patani. Gerakan ini telah menggunakan Islam dan ke-Melayuan sebagai dasar bagi mobilisasi politiknya, strategi politik tersebut, sejauh ini telah berhasil melintasi semua latar belakang sosial orang-orang Melayu Muslim. Selain itu organisasi ini dapat memelihara strukturnya dengan cangguh, bidang garapan PULO meliputi bidang politik, ekonomi, dan hubungan dengan dunia luar. Karena organisasi ini diprokarasi dan diorganisasikan oleh orang-orang terdidik dan intelektual, maka prinsip-prinsip jelas dan terinci, sehingga membedakan dengan organisasi-organisasi politik lainnya. Organisasi ini juga telah berhasil memperoleh banyak dukungan internasional dengan menyampaikan aspirasi-aspirasi rakyat serta tuntutan mereka kepada organisasi Islam Internasional.

Struktur gerakan PULO menunjukkan adanya adanya tiga tingkatan pimpinan. Dan yang menarik adalah bahwa tingkat paling atas, yang menentukan kebijakan, berada di Mekkah, Saudi Arabia. Menurut Komite Khusus Parlemen yang menyelidiki masalah separatisme, PULO memiliki organisasi yang baik dan didukung oleh lebih dari 8.00 Muslim Patani yang bermukim di Kota Suci itu. Tingkat *kedua*, bertanggung jawab atas urusan politik, dan markasnya berada di tumpat, Kelantan (Malaysia). Tingkatan ini mengorganisasi berbagai kegiatan yang diharapkan akan menciptakan kondisi-kondisi politik yang menguntungkan bagi perang gerilya.

Tingkat pimpinan *ketiga* yang paling dikenal, sendirinya adalah pimpinan

operasi militer (*Jabatan Tentara*). PULO memiliki pasukan militer yang paling terlatih dan paling baik perlengkapannya di antara kelompok-kelompok separatis. PULO membanggakan diri memiliki persenjataan yang paling mengesankan dibandingkan dengan persenjataan pemberontakan-pemberontakan lainnya. Pasukan-pasukan bersenjata PULO aktif di semua keempat provinsi Melayu dan di beberapa distrik di provinsi Songkhla.

Disamping dari kegiatan militer, PULO juga mengutamakan kampanye-kampanye politik untuk mempertajam perpecahan antara mayoritas Melayu dan minoritas Cina-Buddhis di provinsi-provinsi itu. Menurut para pejabat pemerintah, PULO mempunyai wakil-wakil di bagian terbesar kampung-kampung melalui para ulama dan para pejabat setempat yang diangkat oleh pemerintah provinsi (*Kamnan/Puyaiban*) karena mempunyai basis politik, maka PULO dengan mudah merekrut pendukung-pendukung di kalangan jemaah haji.

### **Faktor-faktor Pendukung Lahirnya Gerakan *Patani United Liberation Organization***

Mendapat dukungan Internasional meliputi NLFP (*National Liberation Front of Patani*) organisasi yang pusatnya di Mekah-Arab Saudi yang berfungsi mengkoordinasi kegiatannya diberbagai negara, serta melakukan loby internasional diberbagai pertemuan negara-negara Islam sebagai saran efektif untuk menekan pemerintahanThailand. Bahkan pada tahun 1975 organisasi PULO (*Patani united Liberation Organization*) berhasil memobilisasi 70.000 orang Melayu-Muslim untuk demonstrasi politik sehingga aksi ini mampu menarik perhatian pres dunia, sehingga dukungan internasional bertambah besar. Keinginan untuk mendapatkan otonomi dalam keagamaan, kebudayaan, hukum, serta membentuk pemerintahan yang otonom. Dominasi elit politik oleh etnis Thai terhadap eknik Melayu-Muslim dalam pemerintahan nasional dan lokal. Penyeragaman sistem hukum, pembangunan stuktur baru pada isnstitusi pengadilan dan penterjemahan hukum Islam dari bahasa Arab kedala bahasaThai. Dan Penguatan pilar-pilar idiologi “Bangsa, Agama, dan Raja” melalui perlunya kekuasaan absolut pemerintah Thai guna menanamkan persatuan bangsa Thai.

Selain faktor-faktor diatas yang mendukung lahirnya PULO, kita bisa melihat faktor lain yaitu: PULO melakukan kaderisasi dengan cara mendorong para anggotanya untuk memasuki lembaga-lembaga pendidikan keagamaan atau sekuler, entah di Patani atau di luar Negeri. Dengan basis yang memadai, diharapkan mereka akan mudah menyerap penanaman sentimen nasionalisme Melayu serta lebih siap mengantisipasi perkembangan zaman. Mengingat lingkungan di mana mereka tinggal, mata kuliah-mata kuliah yang mereka ikuti (bagian terbesar merupakan ilmu-ilmu agama), dan indoktrinasi ideologi yang mereka serap dari lembaga-lembaga perguruan tinggi Islam di dunia Arab , maka dapat dimengerti bila mereka nantinya kembali ke Thai Selatan

dengan membawa rasa kebanggaan etnik dan identitas Muslim yang lebih menggelora (Hasbullah, 2003: 269).

Pada awal kemunculan PULO pada masa pemerintah Phibul hanya dipandang sebagai bandit biasa namun akhirnya pada tahun 1948, Phibul menyadari bahwa gerakan-gerakan separatis yang berkembang ternyata adalah pemberontakan lokal. Pada tahun ini, Phibul menyatakan perang terhadap terorisme dan memberlakukan hukum darurat militer (*Martial Law*) di wilayah basis Muslim Thailand Selatan, yaitu Pattani, Yala dan Narathiwat. Dampaknya, Thailand Selatan menjadi kancah konflik dan perang antara muslim Patani dengan pemerintah, dan dengan komunitas Buddhis Thai.

Tak kurang dari 5.473 korban tewas dan 9.693 orang terluka korban dari sekitar 843 peristiwa yang terjadi. Di tengah-tengah suasana kacau balau itu, bekumandanglah Adzan dan kalimah syahadah. Keesokan harinya, para ulama menyatakan semua orang tewas itu sebagai *syahid* (martir). Sekarang situasinya sudah datang bagi orang-orang Melayu-Muslim untuk melancarkan perang suci (*Jihad*) terhadap apa yang mereka anggap musuh mereka. Suasana itu dilukiskan dengan baik oleh Suthasat:

*Mereka yang mati Syahid itu harus diperlakukan secara khusus. Jenazah mereka tidak perlu dimandikan atau dibungkus (kain kafan) seperti yang diharuskan bagi jenazah biasa. Yang perlu dicatat adalah bahwa inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah golongan Melayu Muslim di Thai Selatan bahwa mereka mempunyai syuhada sendiri pernyataan (para ulama) yang dikeluarkan dengan suara bulat itu meyakinkan rakyat tentang kesucian orang-orang yang mati itu, dan mereka mempersiapkan diri untuk berkorban dengan cara yang sama. mereka tidak takut sedikit pun, sebab mereka akan bangkit kembali setelah mati. Ada sementara orang yang mengatakan bahwa mereka yang masih saja merasa enggan untuk ikut dalam demonstrasi, berbuat dosa besar.*

Konflik cuplikan di atas telah menarik perhatian dari luar, apakah itu atas dasar afinitas etnis atau ikatan-ikatan bersama seperti agama dan ideologi. Seperti ditulis oleh Suhrke dan Noble:

*Konflik-konflik etnis mempunyai karakteristik-karakteristik istimewa yang menempatkannya dalam bidang dimana politik dalam negeri politik internasional berinteraksi. Konflik-konflik itu kelihatannya menghubungkan kekuatan-kekuatan konflik dan kerja sama dalam dan luar negeri dan, sampai tingkat tertentu, lahir dari interaksi itu karena itu, konflik-konflik itu harus dipahami dalam konteks ini.*

Dalam kasus golongan Melayu-Muslim di Thai Selatan, ada tiga faktor yang menarik perhatian internasional kepada personal mereka. *Pertama*, dengan sendirinya, adalah afinitas etnis antara mereka dan hampir 200 juta jiwa rakyat ras Melayu Asia tenggara. Sejak pergantian abad yang silam, para pemimpin politik di Indonesia dan Malaysia merasa prihatin dengan situasi saudara-saudara yang belum dibebaskan dari kekuasaan Thai. *Kedua*, ikatan Islam yang menghubungkan golongan minoritas Melayu ini dengan dunia Islam, *ketiga*, kepentingan ideologis negara lain yang berharap untuk

memperoleh sekutu dari kalangan berbagai kelompok gerilya yang mengaku mewakili aspirasi-aspirasi golongan Melayu Muslim. mulai menumpukan perhatian terhadap konflik di Selatan Thailand.

Selain itu kedua negara islam dalam ASEAN, Malaysia dan Indonesia untuk mendukung Negeri Thai di kalangan-kalangan Internasional terhadap kegiatan-kegiatan separatis PULO seperti dinyatakan dalam sebuah morandum sangat rahasia yang disusun oleh dewan keamanan nasional Thai dalam 1978. PULO juga mendapat dukungan populer yang kuat dari orang Melayu di Malaysia dan lebih khusus dari partai oposisi Islam di Malaysia, Parti Islam seMalaysia (PAS) yang dikendalikan negara tetangga Kelantan dan yang mendukung separatisme Muslim di Thailand menjabat sebagai seruan yang berguna (Gross, 2007: 70).

Dalam dasawarsa terakhir, sebuah partai oposisi kecil dengan basisi kekuatan di negara-negara bagian Malaysia Utara merupakan sumber kekhawatiran di kalangan pejabat Thai. Para pemimpin *Parti Islam* (PI) di Kelantan, umpamanya, dengan suara lantang menyatakan dukungannya kepada kaum Muslim Patani. Pada tahun 1970, Datuk Mohammad Asri, pemimpin Partai Islam dan Menteri Besar Kelantan, menulis dalam *The Muslim*, London, bahwa perjuangan melawan kekuasaan Thai di Thai Selatan merupakan suatu “perang suci” dan perlu didukung oleh kaum Muslim di seluruh dunia (Pitsuwan, 1989:199).

Di samping itu juga PULO melakukan operasi-operasi militer di tiga provinsi (Yala, Pattani, dan Narathiwat), PULO telah mengembangkan hubungannya dengan luar negeri, khususnya di Asia Barat. Dinas intelejen Siam percaya bahwa organisasi tersebut memperoleh dukungan keuangan dari beberapa negara Islam. *San Francisco Chronicle* melaporkan bahwa PULO memiliki sebuah basis latihan gerilya rahasi di Timur Tengah (Taufik Abdullah Sharon Siddique, 1989: 276). Dalam hubungan internasional PULO memiliki hubungan dengan negara-negara timur tengah seperti Suriah, Lebanon dll. Mereka memiliki kampung pelatihan bagi anggota dan melatih skill kemiliteran di luar negeri. Komandan militer Sama ae Thanam menerima pelatihan militer di timur tengah. Diperkirakan kekuatan PULO sekitar 200-600 pejuang tetapi mereka mengklaim memiliki 20.000 pejuang.

Setelah perpecahan gerakan PULO pada tahun 1993-1995 dan ditangkapnya para pemimpin PULO kondisi umat muslim saat ini, elite Melayu-Muslim diwilayah tersebut menemukan bahwa pernyataan politik otonomi dan hak agama terdengar oleh para pemimpin pemerintah Thailand. Meskipun kebijakan umum asimilasi budaya dan konsolidasi kekuasaan negara Thailand belum dihentikan struktur politik yang berubah dan kondisi ekonomi di tahun 1995-an (Yusuf, 2013: 365).

Penyatuan ini banyak membawa dampak politik, ekonomi maupun kultural. Rapuhnya melayu Patani di Thailand Selatan, lunturnya kekuatan politik dan hilangnya peran elite tradisional mereka menimbulkan efek melemahkan umat. Bahasa Melayu



yang menjadi perekat identitas mereka dan media dalam sistem pengajaran dihapuskan karena mendapat pengawasan dari penguasa Thai. Muslim Thailand merasa dianiaya dan dibawah tekanan pembaharuan oleh mayoritas Budha. Di Thailand kaum Muslim dipandang dengan sikap negatif sebagai orang Khaek. Secara harfiah, dalam bahasa Thai, kata ini berarti “tamu.” Istilah ini juga digunakan untuk menyebut tamu-tamu asing atau imigran kulit berwarna dan dalam konotasi ini dikenakan kepada orang-orang Muslim dari Thailand Selatan, sebagai orang Melayu (Thohir, 209:359).

Pemerintah mencoba menghancurkan sekolah-sekolah Muslim dan menggantinya dengan sekolah-sekolah Thai. Pemerintah juga mencoba menghancurkan sekolah-sekolah Muslim, tidak peduli terhadap perayaan-perayaan Islam, menganiaya, menahan, dan kadang-kadang malah membunuh para pemimpin agama dan politik Muslim, sekitar lima ratus Muslim dibunuh oleh para pemerintah di Selatan, dan terakhir tujuan dari pemerintah adalah untuk menipiskan identitas Islam mereka.

### **Kesimpulan**

Latar belakang lahirnya gerakan *Patani United Liberation Organization: Pertama*, Kebijakan asimilasi yang diterapkan oleh pemerintah Thai di sektor pendidikan yaitu dengan melarang penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar untuk diganti dengan bahasa Thai, mengharuskan pondok menerapkan pendidikan sekuler/sebagai sekolah swasta untuk pendidikan Islam. *Kedua* kepentingan ekonomi, dalam catatan kemiskinan diketahui bahwa Patani adalah wilayah dibawa garis kemiskinan karena sebagian besar akses ekonomi yang ada dinikmati oleh anggota lain seperti orang Thailand yang beragama Budha. *Ketiga* migrasi internal. Adanya program migrasi penduduk dari wilayah Utara telah menciptakan kesenjangan ekonomi antara komunitas Muslim dengan komunitas non Muslim. Para penduduk ini dipindahkan dari wilayah utara ke Selatan. Tujuan lainnya adalah untuk membuat jumlah penduduk di Selatan menjadiimbang antara penduduk Muslim dan Budha. *Keempat* perbedaan identitas, pada dasarnya persoalan perbedaan agama secara umum menjadi begitu signifikan untuk menjelaskan munculnya perlawanan Patani. Persoalan perbedaan agama menjadi salah satu faktor pemicu muncul dan menguatnya perlawanan.

Perjuangan jihad yang dilakukan PULO sendiri sehingga membuka mata dunia bahwa PULO berideolisme Islam dan sangat butuh bantuan dari Negara-negara Islam, ini terbukti kedua negara Islam dalam ASEAN , Malaysia dan indonesia mendukung negeri Thai dikalangan internasional terhadap kegiatan-kegiatan separatist PULO dalam melawan pemerintah Thai. Pada tahun tahun 1993-1995, terjadi perpecahan di antara para pemimpin inti PULO. Para pemimpin PULO ditangkap di awal tahun 1995, dengan seketika kebimbangan terjadi di dalam organisasi ini.

**Daftar Pustaka**

- Ali Kettani, M. 2005. *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yusuf, Choirul Fuad. 2013. *Dinamika Islam Filipina, Burma, dan Thailand*. Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Hitami, Munzir dkk. 2006. *Sejarah Islam Asia Tenggara*. Pekanbaru: Institute For Southeast Asian Islamic Studies (ISAIS) UIN Suska.
- Hasbullah, Moeflich. 2003. *Asia Tenggara Konsentrasi Baru kebangkitan Islam*. Bandung: Fokus Media.
- Kuntowijoyo. 1991. *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*. Bandung: Mizan.
- Mangandaralam, Syahbuddin. 1994. *Thailand Negara Gajah Putih*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pitsuawan, Surin. 1989. *Islam di Muangthai Nasionalisme Melayu Masyarakat Pattani*. Jakarta: LP3ES.
- Rudolf Yuniarto, Paulus. 2005. Minoritas Muslim Thailand Asimilasi, Perlawanan Budaya dan Akar Gerakan Separatisme”, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 7, No. 1.
- Saifullah. 2010. *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supriyadi, Dedi. 2008. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suaedy, Ahmad. 2012. *Dinamika Minoritas Muslim Mencari Jalan Damai Peran Civil Society Muslim di Thailand selatan dan Filipina selatan*. Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Thohir, Ajid. 2011. *Studi Kawasan dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.